

**PENGEMBANGAN ASET KOMUNITAS DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) BERBASIS WISATA**

***VILLAGE COMMUNITY ASSETS DEVELOPMENT THROUGH TOURISM BASED
VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES)***

Vi'in Ayu Pertiwi^{1*}, Destyana Elingga Pratiwi², Deny Meitasari³
^{123*}Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

*Penulis korespondensi: viinayu@ub.ac.id

ABSTRACT

BUMDes as one of the sources of village original income (Pades) are expected to be able to manage assets for the maximum welfare of the village community. Some of the focus of villages in East Java, especially Malang Raya, is the development of assets as tourism units. Of course, developing assets at a tourism Village Owned Enterprises (BUMDes) is not as easy as a large private company in managing a tour. Therefore, BUMDes performance needs to be measured through the level of use of local resources or assets owned by the village for the sustainability of the economy of rural communities around tourism. The research was conducted at BUMDes which concentrates on tourism management, namely BUMDes Kerto Raharjo (Boonpring tourism) Malang Regency. The method used in this research is a qualitative approach with the interactive model analysis by Miles Huberman. Based on the research results, it is known that the assets that are the focus in the development of BUMDes Kerto Raharjo, Sanankerto Village, Turen District are human, structural, social, natural and physical assets as well as financial. The development of these assets is of course faced with various obstacles, especially human assets, where the formal education of the surrounding community who are BUMDes employees is in the low category so that special concentration is needed on improving the education, abilities and skills of BUMDes employees.

Keywords: *BUMDes, assets, welfare, tourism, village*

ABSTRAK

BUMDes sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli desa (Pades) yang diharapkan dapat mengelola aset untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa fokus desa di Jawa Timur khususnya Malang Raya yaitu pengembangan aset sebagai unit wisata. Tentunya pengembangan aset pada BUMDes wisata tidak semudah perusahaan swasta besar dalam mengelola suatu wisata. Oleh karenanya, kinerja BUMDes perlu diukur melalui tingkat penggunaan sumberdaya local atau aset yang dimiliki oleh desa demi keberlanjutan perekonomian masyarakat desa sekitar wisata. Penelitian dilakukan pada BUMDes yang konsentrasi pada pengelolaan wisata yaitu BUMDes Kerto Raharjo (wisata Boonpring) Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis model interaktif Miles Huberman. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aset yang menjadi focus dalam pengembangan BUMDes Kerto

Raharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen yaitu aset manusia, structural, sosial, alam dan fisik serta finansial. Pengembangan aset – aset tersebut tentunya dihadapkan pada berbagai kendala utamanya aset manusia dimana pendidikan formal masyarakat sekitar yang menjadi karyawan BUMDes dalam kategori rendah sehingga dibutuhkan konsentrasi khusus pada peningkatan pendidikan, kemampuan dan ketrampilan karyawan BUMDes.

Kata kunci: BUMDes, aset, kesejahteraan, wisata, desa

PENDAHULUAN

BUMDes menjadi salah satu tumpuan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga yang sangat mendukung masyarakat secara sosial maupun komersial demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan mencari keuntungan melalui pemanfaatan sumberdaya desa. Berdasarkan fungsi tersebut, BUMDes lahir untuk meningkatkan Pades atau Pendapatan Asli Desa (Ridlwan, 2014). Menurut Putra (2015), sebagai badan hukum badan usaha desa ini dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes semakin beragam setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dengan harapan mampu menggerakkan perekonomian desa.

Dalam perkembangannya, banyak jenis peluang usaha desa yang didirikan oleh BUMDes, mulai dari koperasi simpan-pinjam, toko pertanian, pengelolaan sampah dan air, hingga bisnis kuliner. Selain usaha-usaha bermodal besar seperti bisnis kuliner, dalam beberapa tahun terakhir muncul tren baru dalam mengembangkan usaha desa, yaitu usaha wisata sebagai penyangga ekonomi desa. Didukung oleh data dari pendataan Potensi Desa (2018) yang menyebutkan bahwa pulau Jawa dan Bali masih menjadi pulau dengan jumlah desa wisata tertinggi di Indonesia yaitu 857 desa. Beberapa di antaranya bahkan telah mengembangkan objek wisata terkenal dan meraup keuntungan berlipat. Beberapa contoh di antaranya: Umbul Ponggok milik BUMDes Tirta Mandiri Klaten, Café Sawah Pujon Kidul milik BUMDes Sumber Sejahtera, Kafe Kopi Sawah milik BUMDes Jomboran Klaten, Desa Panglipuran di Bali, dan *Green Canyon* milik BUMDes Guha Bau Kertayasa di Pangandaran.

Besarnya potensi wilayah dan dukungan pemerintah melalui Dana Desa harusnya menjadi faktor pendukung bagi BUMDes-BUMDes berbasis wisata untuk lebih berkembang. Keberhasilan suatu BUMDes tidak hanya ditunjukkan dari besarnya profit yang diperoleh, namun lebih pada seberapa besar kontribusi BUMDes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat desa setempat, sesuai tujuan dasar pembentukan BUMDes. Dihadapkan pada kenyataan yang berbeda bahwa BUMDes berhasil bertransformasi, fakta di akar rumput menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes sebagai *hybrid institutions* gagal menyentuh dan memberdayakan warga miskin (Sidik, et al, 2018). Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait bagaimana pengembangan aset komunitas desa dikelola oleh BUMDes demi pengembangan masyarakat desa. Seperti halnya yang disampaikan oleh Green and Haines (2007) bahwa pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk menghasilkan aset yang meningkatkan kapasitas penduduk untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hal tersebut mendorong peneliti untuk menganalisis pengembangan aset komunitas desa dibawah pengelolaan BUMDes dari aspek aset komunitas desa yaitu aset manusia, aspek struktural, aset alam dan fisik, aset sosial dan aset finansial. Selaras dengan jenis aset komunitas yang dirangkum dari pernyataan

Rainey (2003); Green and Haines (2007); Derau (2013) yang meliputi aset fisik, manusia, sosial, finansial, lingkungan, cultural, politik, spiritual.

Penelitian mengenai BUMDes sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai BUMDes dalam tahun terakhir lebih banyak membahas mengenai efisiensi dan pendapatan BUMDes (Sidik, 2017); Persepsi dan partisipasi pemerintah desa dalam perencanaan pengembangan BUMDes (Asti dan Cholid, 2018); Tinjauan mengenai masalah BUMDes (Nurchaya, 2019); keunggulan kompetitif BUMDes (Nugroho, et al., 2020). Berbeda halnya dengan penelitian ini yang lebih menyoroti pengembangan potensi desa dari *community capital* yang dimiliki oleh desa dibawah pengelolaan BUMDes berbasis wisata. Hal ini menjadi pertimbangan sebab perkembangan BUMDes yang mengelola wisata semakin banyak. Maka perlu dianalisa pengembangan potensi atau aset komunitas desa oleh BUMDes berbasis wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu Kabupaten Malang. Wilayah tersebut dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan potensi berkembangnya BUMDes yang berbasis wisata. Sampel lokasi yang dipilih yaitu Eco Wisata *Boon* Pring yang dikelola oleh BUMDes Kerto Raharjo milik Desa Sanankerto dengan pertimbangan bahwa BUMDes tersebut merupakan salah satu BUMDes yang sedang berkembang dalam pengelolaan unit wisata dan pernah mendapatkan penghargaan *Indonesia Sustainable Tourism Awards* (ISTA) 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Sedangkan sampel untuk data primer melibatkan pengurus dari BUMDes, karyawan BUMDes, masyarakat setempat, hingga konsumen/pengunjung sebagai *informan*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bercirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena sosial (Creswell, 2003). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Seperti yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (2014) bahwa analisis data kualitatif sebagai upaya berlanjut, berulang dan terus menerus. Lebih lanjut Miles dan Huberman mengklasifikasikan aktivitas dalam menganalisa data kedalam tahapan : *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Kerto Raharjo mengelola unit wisata yaitu sebuah wisata alam berupa danau buatan yang berasal dari beberapa mata air dan hutan bamboo yang dikenal dengan nama Boonpring. Asal kata Boonpring dari boon yang artinya anugerah dan pring artinya bambu. Sehingga Boonpring artinya anugerah dari bambu. Nama tersebut digunakan sebagai branding dalam menarik masyarakat. Dulu boonpring merupakan hutan bamboo dari tanah kas desa seluas 36,8 hektar. Sekitar 12 ha dikelola menjadi ekowisata dan wisata edukasi. Konsep dari boonpring ini mengangkat tema alam. Banyak tempat wisata buatan yang membuat masyarakat jenuh sehingga dibentuklah boonpring dengan tema alam dan seperti

kembali ke desa. Potensi ini yang akhirnya dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian desa Sanankerto yang terkenal dengan wisata alamnya. Maka dari itu, dianalisa pengembangan aset komunitas desa dalam pengelolaan ekowisata Boonpring oleh BUMDes Kerto Raharjo yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Aset Manusia

Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan anggota komunitas (Green and Haines, 2007). *Human capital* atau aset manusia terutama dalam hal pendidikan formal dalam BUMDes rata-rata masih rendah. Berbeda halnya dengan perusahaan besar swasta maupun BUMN yang dikelola pemerintah yang selalu merekrut karyawan dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. BUMDes sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa lebih banyak memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada di desa. Pada BUMDes Kerto Raharjo Desa Sanankerto, Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tercatat rata-rata pendidikan karyawannya adalah berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SD (Sekolah Dasar) bahkan ada yang buta huruf. Tentunya sangat berat menjalankan usaha dengan kualifikasi pendidikan yang seperti itu. Namun, BUMDes cukup sigap menghadapinya dengan memberikan pelatihan khusus bagi pengurus dan karyawan BUMDes. Hal ini didukung oleh pernyataan Adriani (2019) bahwa *Investment In Human Capital* adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti yang disampaikan oleh SA (65) :

“Ya terutama yang berkaitan dengan manajemen bumdes sendiri yang ada di lingkungan BUMDes, kami ada 1 program namanya pelatihan peningkatan kapasitas pengurus dan karyawan”

BUMDes juga benar-benar memperhatikan keberdayaan dari masyarakat desanya. Dalam hal ini, tidak ada kualifikasi dalam rekrutmen karyawan BUMDes Kerto Raharjo yaitu hanya satu syarat warga Desa Sanankerto, karena untuk penyerapan sumberdaya pekerja disini. Hal ini mendukung program pemerintah agar masyarakat desa tidak banyak pengangguran dengan membantu mengelola BUMDes agar lebih maju. Demi peningkatan kemampuan dan ketrampilan karyawan BUMDes juga mengirimkan ke tempat-tempat pelatihan yang sesuai.

Menurut Direktur BUMDes Kerto Raharjo pendidikan formal bukan sebagai satu-satunya orientasi dalam pengembangan BUMDes. Kemampuan dan ketrampilan menjadi orientasi untuk pengembangan SDM (Sumberdaya Manusia) Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Kerto Raharjo bahkan mengirimkan beberapa karyawan untuk siap menyambut wisatawan dari luar negeri. Pelatihan khusus untuk menghadapi wisatawan global supaya tidak terfokus hanya dalam hal pelayanan terhadap wisatawan domestik yang sudah menjadi perhatian bagi BUMDes ini.

“Yak bener, BUMDES punya guide jadi ada pelatihan guide. Kita kirimkan 5 orang walapun dari segi kualifikasi bahasa inggrisnya juga belum begitu mumpuni tapi sudah kami coba seperti itu ya kadang2 kalau ada seperti itu ya kami tangani sendiri walapun saya sendiri juga turun tangan buat bahasa inggrisnya. Untuk pelatihan nya di Malang.”

Kontribusi BUMDes dalam pengembangan SDM (sumberdaya manusia) tidak hanya berfokus pada karyawan dan pengurus BUMDes. Namun juga berusaha untuk membantu

pendidikan masyarakat sekitarnya. Pemberian beasiswa bagi masyarakat sekitar BUMDes sudah mulai dilakukan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Sanankerto. Hal tersebut menunjukkan orientasi BUMDes sebenarnya tidak hanya profit tetapi juga benefit (manfaat). Benefit diartikan bagaimana BUMDes melakukan pemberdayaan masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja maupun manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga walaupun belum dapat di profit tetapi pemberdayaan tetap berjalan.

Kesejahteraan karyawan BUMDes juga turut diperhatikan dalam pengembangan BUMDes. Hal ini tentunya untuk memotivasi masyarakat yang bekerja sebagai karyawan BUMDes sehingga terus memberikan pelayanan dan bekerja dengan baik. Terdapat peraturan dalam AD-ART BUMDes seperti 7,5 % SHU (sisa hasil usaha) diperuntukan bagi karyawan. Biasanya diberikan kepada karyawan dalam bentuk THR, insentif semacam *reward* dalam bentuk pakaian BUMDES, sepatu, uang lembur dan lain sebagainya. BUMDes juga memperhatikan anggaran kesehatan seperti gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi dan transport untuk meningkatkan kinerja karyawan BUMDes.

Selain itu BUMDes juga mewadahi ide maupun inovasi dari karyawan BUMDes. Terdapat beberapa langkah dalam mewadahi ide ataupun inovasi karyawan BUMDes yaitu, dengan membentuk yang EO bagian pemasarannya yang diberikan kebebasan untuk berinovasi dalam pengembangan BUMDES. Kemudian setiap kepala unit unit wisata, grosir ataupun unit sampah diberikan kebebasan berinovasi sesuai dengan jobnya dipersilahkan mengambil kebijakan asalkan tidak bertentangan dengan AD-ART.

2. Aset Sosial

Putra (2015) mengemukakan bahwa desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. Maka dari itu, modal social turut berkontribusi dalam mendukung eksistensi BUMDes wisata yaitu salah satunya adalah kepercayaan (*trust*). Seperti yang dikemukakan oleh Portes (2010) bahwa modal social dapat didefinisikan sebagai (1) *source of social control*, (2) *a source of family mediated benefits and* (3) *source of resources mediated by non family networks*. Maka dari itu, modal social menjadi sangat penting dalam mendukung keberlanjutan BUMDes dan perekonomian masyarakat desa.

Social capital menjadi penting dalam pengembangan BUMDes dengan berbagai unit usaha yang dimiliki terutama wisata. Modal sosial terkait dengan relasi antar orang dalam organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi dengan pihak luar (modal sosial eksternal) (DeMassis *et al.*, 2011). Dalam hal unsur modal sosial berupa jaringan sosial, berkaitan dengan sistem permodalan BUMDes dimana dalam bentuk hibah dana program CSR perusahaan. Dalam hal ini BUMDes membuka jaringan sosial dengan bekerjasama CSR perusahaan seperti BUMN, PT atau lembaga-lembaga lainnya seperti Forkomnida kabupaten maupun provinsi atau dari kementerian, yang paling banyak justru dari kementerian yang menggunakan anggaran untuk pengembangan BUMDES.

Modal sosial yang juga diperhatikan dalam pengembangan BUMDes ini yaitu membangun kebersamaan, jejaring dan komunikasi yang baik. Seperti contohnya melakukan *upgrading* karyawan untuk membangun kepercayaan (*trust*), kebersamaan dan jaringan sosial yang baik dalam BUMDes ini sendiri sehingga semakin meningkatkan kinerja karyawan BUMDes. Seperti yang disampaikan SA (65) :

“Secara kedinasan dan secara person intinya secara kekeluargaan kami bangun contoh yang gampang ya misalnya di dalam anggarannya BUMDES ada anggaran

insentif karyawan tadi salah satunya untuk kesejahteraan karyawan ayo misal bareng-bareng kita rekreasi yuk ya istilahnya studi banding hanya kemas saja sebenarnya ngelencer gitu rekreasi ada itu kenapa itu saya bangun. Rekreasi tidak membatasi harus sendiri tapi harus sama anak istri ayo ambek keluargane rekreasi. Yang kedua kami setiap saat membuat sebuah event artinya ada club-club tertentu misalnya kita shalawatan, ayuk kita makan-makan bareng syukuran, itulah membentuk dari segi komunikasi.”

Dalam membentuk BUMDes yang sehat tentunya perlunya penerapan aturan-aturan yang mampu mengatur karyawan maupun pengurus BUMDes agar tidak melakukan hal menyimpang. Dalam hal ini tidak dipungkiri pasti ada pihak yang menyimpang dari aturan yang ada. BUMDes sudah menyiapkan aturan tertulis yaitu yang tertuang dalam perjanjian kerja. Jika ada yang melanggar selama ini masih digunakan pendekatan personal secara manusiawi dan masih belum pernah menegur hingga ke jalur hukum.

Modal sosial yang tidak dilupakan oleh pihak BUMDes selaku pengelola wisata desa yaitu dengan menjaga kepercayaan konsumen atau pengunjung wisata. Menjaga kepuasan pengunjung dengan menganggap pelanggan adalah raja sehingga harus dilayani sepenuh hati, ramah dan sopan. Kenyamanan tersebut sebatas kemampuan yang diterapkan pada karyawan BUMDes mengingat bahwa tidak semua karyawan punya pemikiran tentang pelayanan prima. Hal ini juga cukup tergantung dari tingkat pendidikan dan kemampuan karyawan dalam berkomunikasi dengan pengunjung wisata.

Dalam hal ini dibutuhkan orientasi pada struktur organisasi dari BUMDes sendiri agar kuat dan lebih berkembang lagi dalam pelayanan kepada pengunjung. Orientasi BUMDes melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Desa Sanankerto. Mulai dari keterlibatan kepala desa, komisaris, kemudian perangkat desa sebagai pengawas BUMDes, BPD sebagai dewan pertimbangan komisaris termasuk di dalamnya yaitu karang taruna, Pokdarwis, dan kelompok tani. Hal ini ditujukan agar memperkuat kepercayaan dan jaringan sosial dari dalam BUMDes sendiri sehingga mampu meminimalisir gangguan dari luar.

Dalam hal pengaturan organisasi secara struktural dalam BUMDes sudah menerapkan aturan yang cukup ketat layaknya perusahaan. Direktur BUMDes Kerto Raharjo meyakini bahwa karyawan dan pengurus BUMDes sudah melaksanakan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya. Terdapat peraturan yang dibuat oleh BUMDes seperti istilah di perusahaan yaitu Surat Peringatan (SP) 1 maupun SP 2, kemudian pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Hal tersebut sudah dituangkan dalam satu perjanjian kerja yang ditandatangani oleh karyawan BUMDes. Meskipun demikian, BUMDes tetap menggunakan sistem manusiawi karena pada dasarnya seluruh karyawan maupun pengurus merupakan warga desa tersebut dengan masih menjunjung tinggi modal sosial. Menurut SA (65) menyempatkan bahwa :

“Yang penting bagi saya bukan diri saya tetapi bagi mereka kepuasan bekerja sehingga kenyamanan dalam bekerja seperti apa itu yang paling penting bagi saya , kalau begitu langsung kita pecat dan macem-macem, saya khawatir dampak psikologi mereka ada nilai apa namanya balas dendam seperti apa Manusia itu lho, tapi kalau kita manusiakan artinya kita dekati dengan sistem kekeluargaan kamu salah seharusnya kamu seperti ini, ya mari kita kerja dengan baik inget anak istri, keluarga dan sebagainya dia lebih mengena itu, dia lebih hormat kepada saya dan lebih patuh akan kewibawaan akan tercipta disitu tanpa kita minta. Tidak sampai SP1 walaupun kita punya data setiap sudut ada cctv ada 26 titik siapa yang melakukan apapun berdasarkan cctv, saya tahu tapi saya gak pernah mengambil satu langkah sanksi yang berat tapi alhamdulillah sampai saat ini mereka sangat patuh kepada kami.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa modal sosial dalam pengelolaan aset komunitas desa yang dilakukan oleh BUMDes sangat diperhatikan dengan baik. Modal sosial sering mengacu pada hubungan sosial dalam suatu komunitas dan dapat merujuk pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dibangun (Green dan Haines, 2007). Pengelola BUMDes meyakini dengan mengembangkan aset sosial di komunitas desa semakin lebih cepat dan mudah dalam mengelola seluruh unit usaha BUMDes terutama unit wisata.

3. Aset Alam dan Fisik

Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945, dinyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hal ini yang mendasari BUMDes wisata Kerto Raharjo melakukan sebaik-baiknya aset alam danau atau sumber air dan kebun bambu di wilayah Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pengelolaan aset alam tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi wisata tersebut.

Natural capital yang dimanfaatkan dalam pengembangan BUMDes wisata di Desa Sanankerto ini utamanya adalah lahan. Hal tersebut didukung aset yang memang dimiliki oleh pemerintah desa bukan dari aset pribadi atau perorangan. Sehingga apa yang dikelola oleh BUMDes diserahkan oleh desa berdasarkan Perdes (Peraturan Desa). Hal tersebut untuk mengurangi adanya konflik yang menyebabkan kemandekan kinerja BUMDes. Terlihat jelas aset alam yang menjadi daya dukung wisata yang dikelola oleh BUMDes Kerto Raharjo berupa sumber air dan kebun bambu yang menyebabkan wisata ini dikenal sebagai Boonpring (kebun bambu). Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Purwastuty (2018) bahwa aset alam atau lingkungan mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati dalam suatu masyarakat

Sementara dari segi aset fisik yang dikelola BUMDes seperti bangunan stand makanan, kendaraan operasional BUMDes, dan sebagainya. Masyarakat sekitar ekowisata meningkatkan perekonomian dengan berjualan di *stand* makanan yang dikelola oleh BUMDes dengan sistem sewa per tahun oleh masyarakat dengan berbabagi tipe tempat atau ukuran. Selain itu juga terdapat aset lain seperti kendaraan operasional BUMDes. Sedangkan, bangunan beserta tanah yg dikembangkan oleh BUMDes berupa bangunan di atas tanah yang dibeli oleh BUMDes hampir 0,25 ha. Lahan tersebut dibeli untuk unit grosir (tempat swalayan bumdes) dan pengembangan usaha. Seperti halnya yang disampaikan oleh Green dan Haines (2007) modal fisik biasanya terdiri dari jalan raya, gedung, infrastruktur, dan sumber daya alam dalam suatu komunitas.

Wisata yang dikelola oleh BUMDes juga membawa dampak positif bagi warga masyarakat sekitar. Masyarakat dapat berwirausaha di sekitar lokasi wisata. Termasuk juga keluarganya bisa bekerja di BUMDES dan bisa berjualan. BUMDes juga berusaha meningkatkan wirausaha masyarakat desa Sanankerto. Fasilitas toilet juga disediakan oleh warga juga keuntungannya untuk warga masyarakat. Dampak positif lebih banyak dirasakan daripada negatifnya seperti yang disampaikan oleh key informan berikut:

“Sisi negatif oh tidak ada kalau kita hitung dari segi timbangan lebih abot utunge daripada gak untungnya contoh sederhana, air ini akhirnya terawat karena bangunannya cukup terawat kan terjaga juga padahal air ini mengairi 3 desa untuk irigasi sawah. Justru adanya tempat wisata ini kebersihannya sudah lumayan bagus”

Aset fisik yang digunakan untuk pengembangan unit wisata yang dikelola BUMDes contohnya juga sarana prasarana komunikasi. Alat komunikasi berupa HT, pakaian, dan sarana transportasi tetapi tidak semuanya kendaraan untuk operasional. Pengelolaan sarana dan prasarana di pihak inventaris dan sesuai dengan nama-nama yang bertanggung jawab. Masyarakat boleh mengakses sarana dan prasarana dengan cara menghubungi pihak yang bertanggung jawab dengan disertai rekomendasi sepanjang itu tidak digunakan oleh organisasi lain.

4. Aset Finansial

Menurut Purwastuty (2018) Aset ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat (seperti penghasilan, tabungan, pendanaan reguler, pinjaman aset usaha, sertifikat surat berharga, saham, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat. BUMDes diketahui sebagai badan usaha yang didirikan oleh desa dengan tujuan untuk mengelola aset desa demi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Modal finansial awal yang dimiliki BUMDes tentunya dari anggaran dana desa yang memang sudah menjadi program pemerintah pusat dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga mendapatkan cukup banyak bantuan dari BUMN berupa CSR, kemudian dari perguruan tinggi ada untuk pengabdian kepada masyarakat. Terdapat juga dari SKPD Dinas Kabupaten tergantung dinasnyanya contohnya PUPR memberikan paving. Selain itu juga BUMDes mendapatkan modal finansial dari Kemendes PDPT. BUMDes juga memiliki sertifikat tanah dari yang dibeli untuk pengembangan usaha seperti yang dibahas dalam aset fisik sebelumnya.

Pengelolaan finansial 25% untuk pengembangan sesuai dengan RAB yang sudah di programkan dalam rencana anggaran belanja BUMDes disesuaikan dengan perencanaannya. Sementara itu, penghasilan dari unit wisata dilaporkan pada komisaris kepala desa dengan alur dari BUMDes kemudian dilakukan pembuatan laporan akhir tahunan yang ditujukan kepada komisaris. Sistem pengelolaan pengeluaran dikembalikan pada program tersebut kecuali ada pengeluaran insidental maka harus dari pihak yang mengeluarkan laporan. Misalkan ada program kemudian disetujui oleh Direktur BUMDes dan diarahkan pada bendahara untuk mendapatkan persetujuan bendahara baru kemudian bisa melakukan pengambilan di kasir. Selama tatanan BUMDes pernah melakukan pengembangan modal pada unit tertentu yang mengharuskan pihak BUMDes melakukan peminjaman pada pihak ketiga. Seperti yang disampaikan oleh SA (65) :

“Ya pernah , dalam rangka mengembangkan modal kadang gak cukup to itu kita harus mencari pihak ketiga utang biasa itu, untuk pengembangan yang jelas. Percepatan pertumbuhan 25% gak mungkin gak cukup dalam kurung waktu 3 tahun ini nyulap dari lembah dadi ngene kan nggak mungkin , kita harus mencari trobosan-trobosan selain kita dapatkan dari dana hibah.”

Maka menjadi sangat penting untuk keterbukaan sistem finansial BUMDes. Hal ini untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat desa maupun seluruh anggota BUMDes. Pengelolaan dan pengembangan aset finansial BUMDes baik dari luar maupun pendapatan asli desa harus dilakukan secara terbuka dengan sistem yang teratur seperti yang dilakukan oleh BUMDes Kerto Raharjo. Seperti yang dikemukakan oleh Dewi (2014) bahwa sifat pengelolaan usaha BUMDes pada dasarnya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Mengingat fungsi BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa,

sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembangan aset komunitas desa oleh BUMDes dalam pengelolaan unit wisata cukup baik dilihat dari pemanfaatan aset manusia, struktural, sosial, alam, fisik dan finansial yang mempertimbangkan setiap potensi lokal desa demi peningkatan kinerja BUMDes. Tingginya modal sosial mendukung seluruh pengelolaan wisata yang dikelola oleh BUMDes dan didukung oleh tingginya potensi dari aset komunitas. Namun, kondisi aset manusia yang bekerja di BUMDes utamanya dari segi pendidikan formal masih sangat minim di wilayah BUMDes Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan aset desa melalui BUMDes maka saran yang dapat diberikan yaitu supaya pihak BUMDes memberikan bantuan program kejar paket Pendidikan formal serta menggalakkan pelatihan dan peningkatan kemampuan maupun ketrampilan bagi karyawan BUMDes karena masih minimnya kondisi aset manusia yang bekerja di BUMDes utamanya dari segi Pendidikan formal supaya untuk generasi ke depannya semakin mendukung kemajuan perekonomian Desa Sanankerto umumnya dan BUMDes Kerto Raharjo khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Evi. (2019). Pengukuran Modal Manusia (Suatu Studi Literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4(1), 176-183
- Asti & Cholid, Irfan. (2018). Persepsi Dan Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pengembangan Bumdes Di Kecamatan Kendawangan. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Vol 6 No 1, Juni 2018)*: 1-14
- Creswell. J.W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. Chapter One. A Framework for Design. Thousand Oaks, London, dan New Delhi: SAGE Publications
- De Massis, A., Federico, F., Pizzurno, E. and Cassia, L. (2011). Product innovation in family vs non-family firms: an exploratory analysis. *Journal of Small Business Management*. Vol. 53 No. 1, pp.1-36.
- Derau, Christoper. (2013). *Pembaru dan Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II: TT Danim Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*. Volume V No. 1 Februari 2014
- Green, G.P. and Haines, A. (2007). *Asset Building and Community Development*, 2nd edn, Thousand Oak, CA: Sage.
- Miles dan Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta : UI-Press
- Nugroho, Condro P., Pertiwi, Vi'in A., Meitasari, P., and Pratiwi, Destyana Ellingga. (2020). Improving the Competitive Advantage of BUMDes Based on The Optimal Utilization of Local Assets Communities. *HABITAT*, 31 (3), 2020, 161-168
- Nurchahya, Eka. (2019). Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa. *Responsive*, Volume 2 No. 1 Mei 2019 : 1 – 7
- Portes, Alejandro. (2010). *Economic Sociology : A systematic inquiry*. Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey.
- Purwastuty, Ida. (2018). Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Aset Komunitas. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Edisi I, November 2018 : 1-16
- Putra, Anom Surya. (2015). *Buku 7 Badan Usaha Milik desa: Spirit Kolektif desa*. Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Ridlwan, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Perekonomian Milik Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No 3 Juli - September 2014.
- Sidik, Fajar, Nasution dan Herawati. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) : Unit Usaha, Pendapatan, Dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, Vol. 5, No. 3, Agustus 2017: 36-46
- Sidik, Fajar, Nasution dan Herawati. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Pongkok dan Kritik Terhadap Prestasi “Terbaik Nasional”1. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 5 No. 2, Agustus 2018
- Surono, Agus. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding (Jurnal Pembinaan Hukum Nasional)* Volume 6, Nomor 3, Desember 2017